

Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)



Ket [Foto]: Pemkab Temanggung dan Bea Cukai Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal

Pemkab Temanggung dan Bea Cukai Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal

Kamis, 30/07/2026 13:25 WIB Smart Government
Pemerintahan 27 0

Temanggung, Media Center - Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Bea Cukai Magelang mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan, serta sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat agar semakin memahami ketentuan cukai, serta tidak memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai resmi.



beberapa daerah penghasil tembakau, seperti Kabupaten Temanggung.

"Rokok ilegal merugikan banyak orang dan pastinya merugikan negara, untuk itu, kita antisipasi agar peredarannya tidak masif di Temanggung, karena yang jelas negara rugi tidak ada pendapatan. Yang kedua, kami sebagai penyedia tembakau juga tidak memperoleh hal positif, karena rokok ilegal tidak jelas penyediaan bahan bakunya itu berasal dari mana," tandasnya, pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai bagi pelaku usaha Kabupaten Temanggung, Kamis (30/7/2026) di Jambuklutuk Resort, Parakan.

Menurut Bupati, edukasi mengenai aturan cukai harus terus dikencangkan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal.

"Melalui sinergi ini upaya penindakan yang dibarengi edukasi diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal, kemudian dapat melindungi penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan cukai," lanjutnya.

Fungsional Ahli Pertama, Bea Cukai Magelang, Dedik Agus Satriawan mengatakan, sejak bulan Januari hingga Juli 2026 pihaknya telah melakukan penindakan terhadap sekitar satu juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai lebih dari Rp1 miliar. Capaian tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal.

"Tahun ini, kami sudah ada penindakan satu juta batang dan nilainya lebih dari satu miliar dan tentunya untuk eksekusi akhir nanti kami akan memusnahkan atas hasil dari penindakannya," tuturnya. (Fir;Ekp)

Pemkab Temanggung dan Bea Cukai Gencarkan Pemberantasan Rokok Ilegal



Bagikan:

 Instagram  Facebook  Twitter  WhatsApp  Telegram  LinkedIn  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian

Ketik..



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 8 0



BRIN Turun ke Temanggung Serap Aspi →
Rabu, 02/09/2026 20:53 WIB 3 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 3 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 3 0

Berita Terpopuler



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 107775 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 78617 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 63509 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)

Kepala Daerah (555)

Kesehatan (339)

Pendidikan (272)

Sosial (301)

Ekonomi (322)

Ekonomi Kreatif (57)

Wisata & Budaya (272)

Rudimas (36)

Cek Fakta (540)

Stop Judi Online (13)

Temanggung (4113)

IKN (Nasional) (273)

Tags Smart



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)



Ket [Foto]: Merti Dusun Cemoro, Bupati Agus Gondrong Ingatkan Pentingnya Pohon Tegakan

Merti Dusun Cemoro, Bupati Agus Gondrong Ingatkan Pentingnya Pohon Tegakan

Jumat, 10/07/2026 13:46 WIB Smart Government
Pemerintahan 9 0

Temanggung, MediaCenter - Bupati Agus Setyawan memanfaatkan momentum tradisi Merti Dusun di Dusun Cemoro Timur, Desa Cemoro, Kecamatan Wonobojo, Jumat Pon (10/7/2026), untuk mengajak warga menjaga kelestarian alam. Pасalnya, warga yang tinggal di daerah pegunungan

"Karena kita sebagai masyarakat yang hidup di wilayah pegunungan tidak mungkin bisa hidup jauh dari lingkungan dan pohon. Apalagi para leluhur memberikan nama 'Cemoro' itu penuh makna agar kita mendapat kenyamanan dan kesejukan. Jangan sampai nama Cemoro ini hanya jadi simbol, tanpa dibarengi pelestarian alam," pesan Bupati Agus.

Bupati akrab disapa Agus Gondrong ini mengingatkan, bahwa kelalaian dalam merawat alam pegunungan akan berdampak langsung pada penurunan hasil pertanian setempat. Selain itu juga memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang berdampak kepada masyarakat di kawasan hilir (Temanggung bawah).

Terkait pengelolaan lahan, Agus Gondrong juga menyampaikan pesan dari Perum Perhutani KPH Kedu Utara mengenai penguatan kesadaran hukum kehutanan. Ia meminta masyarakat yang memanfaatkan lahan negara tersebut untuk mengedepankan tanaman tegakan (pohon berkayu keras) ketimbang tanaman semusim.

Salah satunya melalui penerapan sistem agroforestry atau tumpang sari di bawah tegakan hutan, dengan memilih komoditas kopi sebagai tanaman alternatif. Karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi, sekaligus efektif dalam mendukung fungsi konservasi hutan.

"Jadi, saya minta tolong kepada masyarakat Cemoro untuk mulai dikembangkan dan ditingkatkan tanaman tegakan. Jangan sampai desanya sudah diberi nama para leluhur Cemoro, tapi lingkungannya gundul tidak ada tanaman tegakan. Ini demi masa depan anak cucu kita," tandasnya seraya menyerahkan bibit pohon tanaman tegakan.

Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, nama Desa Cemoro diambil dari keberadaan sepasang pohon cemara legendaris yang tumbuh di dua dusun terpisah. Pohon di Dusun Cemoro Barat diyakini sebagai representasi perempuan,



Tradisi Merti Dusun dan Nyadran di desa lereng gunung Prau ini berlangsung meriah dengan melakukan kirab Tumpeng Agung hasil bumi. Selain itu, warga melakukan penyembelihan kambing untuk dimasak bersama sebagai wujud syukur atas limpahan rezeki dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Adt;Istw;Ekp)

Merti Dusun Cemoro, Bupati Agus Gondrong Ingatkan Pentingnya Pohon Tegakan

 MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian

Ketik..



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 8 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 3 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 3 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 139037 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 107775 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 78617 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 63509 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)

Kepala Daerah (555)

Kesehatan (339)

Pendidikan (272)

Sosial (301)

Ekonomi (322)

Ekonomi Kreatif (57)

Wisata & Budaya (272)



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Kajari Temanggung: Pencegahan Penyimpangan Dana Desa Lewat "Jaga Desa"

Kajari Temanggung: Pencegahan Penyimpangan Dana Desa Lewat "Jaga Desa"

Rabu, 08/07/2026 08:22 WIB Smart Government

Pemerintahan 48 0

Temanggung, Media Center - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung, Arifin Arsyad menyampaikan terus mengedepankan langkah pencegahan dalam pengelolaan anggaran desa melalui program "Jaga Desa" (Jaksa Garda Desa).

la menuturkan, program tersebut dilengkapi dengan aplikasi yang digunakan oleh kepala desa untuk menyampaikan



"Dalam rangka melakukan tindakan pencegahan, Kejaksaan memiliki program Jaga Desa. Melalui aplikasi tersebut, kepala desa wajib memasukkan berbagai informasi guna meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pengeluaran anggaran," ungkapnya pada kegiatan "Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes" di Balai Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Rabu (8/7/2026).

Selain memuat laporan penggunaan anggaran, aplikasi "Jaga Desa" juga menjadi sarana bagi kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di desa, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program strategis nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), maupun Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Kajari, laporan yang disampaikan kepala desa, maupun penerima manfaat akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

la menegaskan, pengelolaan pemerintahan desa memerlukan kehati-hatian, karena kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) setiap kepala desa tidak sama. Oleh sebab itu, apabila ditemukan persoalan yang bersifat administratif, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maupun bimbingan dari dinas yang membidangi pemerintahan desa.

"Kami memiliki nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Apabila ada laporan terkait pengelolaan anggaran pemerintahan daerah, penyelesaiannya didahulukan melalui APIP," lanjutnya.

Kejaksaan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai instansi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Di bidang intelijen, Kejaksaan juga menjalankan program



Kegiatan penyuluhan tersebut, katanya, banyak diikuti oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan.

Sementara itu, sepanjang tahun 2026 tercatat satu pengaduan masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan desa yang diterima Kejaksaan. Namun, laporan tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada APIP untuk dilakukan pemeriksaan.

Ia menuturkan, apabila hasil pemeriksaan APIP menemukan adanya indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana, maka hasil tindak lanjut tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Fir;Ekp)

Kajari Temanggung: Pencegahan Penyimpangan Dana Desa Lewat "Jaga Desa"

«» MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 8 0



BRIN Turun ke Temanggung Serap Aspi →
 Rabu, 02/09/2026 20:53 WIB 3 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 3 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 3 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 139037 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 107775 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 78617 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 63509 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Pemkab dan Kejari Temanggung Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa

Pemkab dan Kejari Temanggung Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa

Rabu, 08/07/2026 08:21 WIB  Smart Government

 Pemerintahan  29  0

Temanggung, Media Center - Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Temanggung memperkuat pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan, serta pemerintahan desa.

Bupati Agus Setyawan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan, sekaligus menciptakan rasa aman



Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung dan diikuti oleh perwakilan dari 266 desa se-Kabupaten Temanggung. Dalam pertemuan ini, melibatkan peserta tidak hanya kepala desa, tetapi juga sekretaris desa dan bendahara desa.

"Intinya adalah pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan dan pemerintahan desa. Kami ingin teman-teman di pemerintahan desa merasa nyaman dan aman dalam menjalankan tugasnya di masing-masing desa," tandas Bupati Agus Setyawan pada penutupan roadshow "Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes" di Balai Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Rabu (8/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menekankan pentingnya membedakan antara kesalahan administrasi dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana. Setiap laporan atau aduan yang berkaitan dengan administrasi akan terlebih dahulu diserahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Kabupaten Temanggung, untuk dilakukan telaah awal.

Menurut Bupati, langkah tersebut penting agar setiap aduan dapat dikaji secara objektif sebelum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Kami perlu mencermati bersama apakah aduan tersebut bersifat tendensius atau memang benar-benar terjadi pelanggaran di lapangan. Karena itu perlu dilakukan investigasi awal. Alhamdulillah, APIP bersama Pak Kajari diberikan kewenangan untuk menelaah lebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut di kejaksaan," lanjutnya.

Ia menuturkan, dari hasil pembinaan yang dilakukan, jumlah temuan administrasi dinilai relatif sedikit. Sebagian besar kesalahan terjadi, karena perbedaan kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa, bukan karena adanya unsur kesengajaan untuk melakukan penyimpangan.



Alhamdulillah, seluruhnya dapat kami selesaikan bersama melalui pembinaan," ungkapnya.

Ia menyampaikan, melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Temanggung, diharapkan tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. (Fir;Istw;Ekp)

Pemkab dan Kejari Temanggung Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa

🔊 MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian



Berita Terbaru



BRIN Turun ke Temanggung Serap Aspi →
 📅 Rabu, 02/09/2026 20:53 WIB 👁 3 ❤️ 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 📅 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 👁 3 ❤️ 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 📅 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 👁 3 ❤️ 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 📅 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 👁 139037 ❤️ 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 📅 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 👁 107775 ❤️ 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 📅 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 👁 78617 ❤️ 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 📅 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 👁 63509 ❤️ 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)

Kepala Daerah (555)

Kesehatan (339)

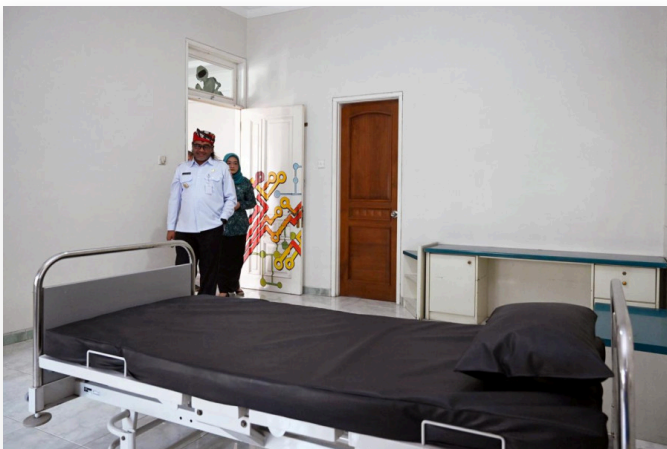
Pendidikan (272)

Sosial (301)

Ekonomi (322)



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Setahun Beroperasi, Ini Manfaat Rumah Singgah Temanggung di Semarang dan Jogja

Setahun Beroperasi, Ini Manfaat Rumah Singgah Temanggung di Semarang dan Jogja

Senin, 06/07/2026 07:57 WIB Smart Government

Pemerintahan 101 0

Temanggung, MediaCenter – Pemerintah Kabupaten Temanggung mencatat sebanyak 409 kunjungan warga telah memanfaatkan fasilitas Rumah Singgah gratis yang berlokasi di Semarang dan Yogyakarta sepanjang periode satu tahun pertama, yakni sejak 25 Juni 2025 hingga 20 Juni 2026.



?Bupati Agus Setyawan mengungkapkan, bahwa program ini lahir dari pengalaman pribadinya yang kerap mendapati warga Temanggung telantar atau terpaksa tidur beralaskan seadanya di selasar rumah sakit akibat kendala biaya penginapan saat mendampingi keluarga yang dirujuk.

"Alhamdulillah bermanfaat. Karena betapa susahny kalau ada anggota keluarga sakit. Jangan ditambah beban biaya penginapan lagi. Rumah singgah ini gratis untuk pendamping pasien, pelajar, pencari kerja, hingga keperluan darurat. Yang penting warga ber-KTP Temanggung," ungkapnya, Senin (6/7/2026).

Salah seorang warga, Ifwandi Yusuf, menuliskan pengalamannya melalui platform Google Maps. Ia mengaku memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendampingi anggota keluarganya yang menjalani pengobatan rawat jalan di Yogyakarta.

"Cukup bagus tempatnya. Ada saudara yang periksa rujukan dari RS Temanggung hasilnya menunggu tiga hari. Daripada pulang pergi, Rumah Singgah ini sangat membantu dari segi biaya dan capeknya pasien," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Leli Emiliya. Ia mengaku mengetahui Rumah Singgah tersebut saat membujuk tetangganya yang sedang menjalani perawatan di RSUP Sardjito Yogyakarta.

"Karena suatu prosedur, daripada pasien bolak balik Temanggung - Jogja, jadi Rumah Singgah ini bisa dipergunakan.

Tempat lumayan luas, bersih, dan sangat layak untuk transit pasien dan keluarga yang menemani," ujarnya.

?Berdasarkan data Dinas Sosial Temanggung, Rumah Singgah di Semarang mencatat sebanyak 207 kunjungan yang didominasi oleh pencari kerja, rombongan pelajar kompetisi, serta atlet daerah. Sementara itu, Rumah Singgah di



RSUP Dr. Sardjito.

?Masyarakat Kabupaten Temanggung yang membutuhkan tempat transit atau penginapan darurat di luar kota dapat langsung mendatangi lokasi dengan ketentuan cukup menunjukkan KTP Temanggung selama kapasitas kamar masih tersedia. (Adt;Ekp)

Setahun Beroperasi, Ini Manfaat Rumah Singgah Temanggung di Semarang dan Jogja

← MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 8 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 3 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 3 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 139037 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 107775 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 78617 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 63509 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)

Kepala Daerah (555)

Kesehatan (339)

Pendidikan (272)

Sosial (301)

Ekonomi (322)

Ekonomi Kreatif (57)

Wisata & Budaya (272)



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Pemkab Temanggung Tegaskan: SPMB Harus Transparan dan Sesuai Mekanisme

Pemkab Temanggung Tegaskan: SPMB Harus Transparan dan Sesuai Mekanisme

Selasa, 19/05/2026 10:49 WIB Smart Government

Pemerintahan 128 0

Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang transparan, adil, dan berintegritas. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi



Wakil Bupati, Nadia Muna mengatakan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu, proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

"Saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan, bahwa melalui kebijakan SPMB ini pemerintah berupaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Wabup, sosialisasi tersebut penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme, jalur penerimaan, persyaratan, hingga tahapan pelaksanaan SPMB. Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

"Jangan sampai ada praktik titipan, manipulasi data, maupun bentuk pelanggaran lain yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan," tegasnya.

Ia meminta jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora), serta panitia SPMB memberikan pelayanan terbaik, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kepada para orang tua, Wabup mengajak agar memahami aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga proses penerimaan murid baru dapat berjalan tertib dan kondusif.

"Pada intinya, dalam pelaksanaan SPMB ini biasanya rawan titipan, jadi mohon untuk tetap berintegritas, tidak ada titip-menitip. Lakukan saja sesuai aturan dan mekanisme," tandasnya.

Wabup juga mengingatkan para wali murid agar tidak terpaku pada sekolah tertentu. Menurutnya, talenta anak akan tetap berkembang apabila didukung proses pendidikan yang baik.



Kegiatan sosialisasi ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh unsur Forkopimda dan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung, Dindikcapil, Dinsos, Dinkominfo, DPUPR, Inspektorat, Dewan Pendidikan, Bunda PAUD, serta PGRI.

Sementara itu, Kepala Dindikpora Temanggung, Djoko Prasetyono menjelaskan, SPMB merupakan prosedur terpadu untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem tersebut juga bertujuan memastikan pemerataan akses pendidikan, kesesuaian domisili siswa, serta daya tampung sekolah.

“Hari ini kita ingin memastikan akses pendidikan, domisili siswa dan daya tampung sekolah bisa terlayani dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Djoko menambahkan, pihaknya sengaja mengundang seluruh Kepala SD dan SMP agar memahami mekanisme teknis pelaksanaan SPMB yang akan dilaksanakan serentak di Kabupaten Temanggung. Selain itu, Dindikpora juga telah membentuk helpdesk dan Satgas untuk membantu masyarakat mengakses layanan pendidikan, termasuk pendampingan pembuatan akun dan layanan administrasi di sekolah, maupun UPT. (SV;EKP)

Pemkab Temanggung Tegaskan: SPMB Harus Transparan dan Sesuai Mekanisme

🔊 MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest



Pencarian



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 📅 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 👁️ 8 ❤️ 0



BRIN Turun ke Temanggung Serap Aspi →
 📅 Rabu, 02/09/2026 20:53 WIB 👁️ 3 ❤️ 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 📅 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 👁️ 4 ❤️ 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 📅 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 👁️ 3 ❤️ 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 📅 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 👁️ 139037 ❤️ 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 📅 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 👁️ 107775 ❤️ 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 📅 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 👁️ 78617 ❤️ 5



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Sambangi Desa Gununggempol, Kementerian Lingkungan Hidup Dukung Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

Sambangi Desa Gununggempol, Kementerian Lingkungan Hidup Dukung Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

 Jumat, 15/05/2026 09:17 WIB
  Smart Government
 Pemerintahan
  104
  0

Temanggung, MediaCenter – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengapresiasi Kabupaten Temanggung sebagai salah satu potret inspiratif menjalankan program desa mandiri pengelolaan sampah. Hal ini tercermin dari Desa Gununggempol di Kecamatan Jumo yang dinilai berhasil



Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah KLH, Hanifah Dwi Nirwana, dalam audiensi di Pendopo Desa Gununggempol, Jumat (15/5/2026), mengungkapkan bahwa kunjungannya ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, dengan Bupati Temanggung Agus Setyawan di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketika itu, Bupati menceritakan, bahwa Temanggung telah menginisiasi gerakan pilah sampah dari rumah yang kini menjadi isu nasional.

"Sejak pertemuan itu, pokoknya suatu saat saya harus ke sana. Alhamdulillah, hari ini saya bisa datang ke Desa Ketitang dan Gununggempol yang luar biasa ini. Karena setiap kali mendampingi Pak Menteri bertemu dengan para kepala daerah, saya selalu mengendorse soal kegiatan pilah sampah dari rumah yang sekarang lagi booming jadi gerakan nasional," ungkapnya.

Menurut Hanifah, kehadiran tim KLH di Temanggung bertujuan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana membangun "nawaitu" atau niat kolektif masyarakat dalam mengelola lingkungan. Pihaknya ingin mengetahui upaya membangun kesadaran, antusiasme, partisipasi, hingga tanggung jawab masyarakat dalam tata kelola sampah.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini KLH tengah melakukan pendampingan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mencakup puluhan ribu desa. Keberadaan desa-desa seperti Gununggempol diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan sampah nasional.

"Kami harapkan, ada lebih banyak desa yang mereplikasi gerakan seperti ini sesuai dengan potensinya masing-masing, maka persoalan sampah di tingkat nasional tentu akan selesai. Karena yang paling penting itu soal endurance alias ketahanan untuk terus menerus tanpa lelah mengajak masyarakat mengelola sampah secara progresif," tambahnya.



telah memiliki 136 Desa Mandiri Sampah yang didukung oleh 51 unit TPS 3R dan 121 Bank Sampah.

"Insyaallah, kita akan bersama-sama menjalankan penanganan sampah ini, walaupun masih ada permasalahan, khususnya di tingkat hilir (Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Sanggrahan)," pungkasnya. (Adt;Istw;Ekp)

Sambangi Desa Gununggempol, Kementerian Lingkungan Hidup Dukung Gerakan Pilah Sampah dari Rumah

➞ MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 8 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 4 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 3 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 139037 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 107775 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 78617 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 63509 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)

Kepala Daerah (555)

Kesehatan (339)

Pendidikan (272)

Sosial (301)

Ekonomi (322)

Ekonomi Kreatif (57)

Wisata & Budaya (272)



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Setujui Lokasi Polsubsektor Wonoboyo; DPRD Temanggung Minta Pembangunan Segera Direalisasikan

Setujui Lokasi Polsubsektor Wonoboyo; DPRD Temanggung Minta Pembangunan Segera Direalisasikan

 Kamis, 07/05/2026 14:06 WIB
  Smart Government
 Pemerintahan
  101
  0

Temanggung, MediaCenter - Setelah melalui berbagai pertimbangan, DPRD Temanggung akhirnya menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk pendirian Kantor Polsubsektor Wonoboyo. Hal tersebut dikemukakan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Terhadap



Pelapor Komisi A dan Komisi C DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo mengatakan, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terhadap Surat Bupati Temanggung Nomor 028.1/002/I/2026 tanggal 5 Januari 2026, perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah terkait Kantor Polsubsektor Wonoboyo telah diambil keputusan melalui berbagai tahapan pembahasan.

Komisi gabungan telah memanggil perangkat daerah terkait hingga peninjauan lapangan untuk melihat secara dekat dan pasti lokasi barang milik daerah, kondisi fisik, serta kesesuaian dokumen aset. Kemudian dilakukan kesimpulan hingga keputusan, terkait objek tanah di Desa Wonoboyo atas tanah hak pakai atas nama Pemkab Temanggung seluas 759 meter persegi dan berupa bangunan eks Rumah Dinas Camat Wonoboyo, luas kurang lebih 198 meter persegi tercatat dalam kantor inventaris barang gedung bangunan.

"Setelah dilakukan telaah dan pendalaman rapat gabungan Komisi A dan Komisi C berkesimpulan, bahwa barang milik daerah tersebut sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pemindahtanganan telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pertimbangan dari permohonan persetujuan ini selanjutnya agar segera ditindaklanjuti pembangunan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, dewan meminta kepada pihak kepolisian setelah dihibahkan agar segera dibangun, atau paling tidak DIPA segera diusulkan ke Mabes Polri. Namun, ia menggarisbawahi, bahwa Pemkab Temanggung hanya akan memberikan hibah barang atau aset tanah dan bangunan yang ada itu dan tidak menanggung biaya pembangunannya nanti, termasuk biaya administrasi.

Bupati Agus Setyawan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas persetujuan yang diberikan oleh legislatif terhadap Surat Bupati Temanggung Nomor 028.1/002/I/2026



Permohonan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah melalui surat tersebut merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hibah tanah kepada Kepolisian Resort Temanggung, yaitu tanah untuk Polsubsektor Wonobojo, sebagai dukungan dari DPRD dan Pemkab kepada pihak kepolisian dalam rangka peningkatan pelayanan dan ketertiban masyarakat.

"Asetnya milik Pemda, maka permohonan aset dari Polres Temanggung pastinya kita komunikasikan dan harus mendapat persetujuan DPRD. Alhamdulillah, setelah melalui proses bersama hari ini, surat pengajuan kami kepada DPRD disetujui, ini dulu rumah dinas Camat Tretep terus jadi rumah dinas Camat Wonobojo, jadi bangunan lama tempatnya di depan kantor Kecamatan Wonobojo lama. Keberadaannya pasti akan menopang, mendukung kaitan keamanan, ketertiban dan tahun ini akan dilanjutkan pula pembangunan Mapolsek Tretep, dalam rangka melayani masyarakat kaitan masalah kamtibmas," tandasnya. (ary;ekp)

Setujui Lokasi Polsubsektor Wonobojo; DPRD Temanggung Minta Pembangunan Segera Direalisasikan

(*) MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook





Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 8 0



BRIN Turun ke Temanggung Serap Aspi →
 Rabu, 02/09/2026 20:53 WIB 4 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 4 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 3 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 139037 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 107775 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 78617 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 63509 10



Detail Berita

[Home](#) / [Berita](#) / [Detail Berita](#)


Ket [Foto]: Otonomi Daerah Jadi Instrumen Penting Pemerataan Pembangunan

Otonomi Daerah Jadi Instrumen Penting Pemerataan Pembangunan

📅 Senin, 27/04/2026 15:01 WIB 📍 Smart Government
📁 Pemerintahan 👁 112 ❤ 0

Temanggung, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Temanggung menggelar upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Bupati Agus Setyawan bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan sambutan Mendagri yang memuat beberapa hal pokok terkait Otonomi Daerah, salah satunya adalah sebagai instrumen penting bagi pemerataan pembangunan.

Tri Winarno, Ketua TPP PKK Panca Dewi, perwakilan DPRD, Polres dan diikuti pula oleh segenap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

"Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi Daerah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Adapun tema peringatan tahun ini adalah "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Hal tersebut mengandung makna, pentingnya tanggungjawab dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, serta menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi Daerah sendiri memberikan ruang inovasi, namun tetap harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional harus terus dijaga. Ditekankan pula terkait tantangan global, ada beberapa prioritas yang harus dikedepankan, yakni penguatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kemudian pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan gizi masyarakat, pemerataan layanan kesehatan berkualitas, hingga reformasi birokrasi. (ary;ekp)

Otonomi Daerah Jadi Instrumen Penting Pemerataan Pembangunan

🔗 MEDIA CENTER

Bagikan:



Inpres pembangunan.

Oleh karena itu, lanjutnya, F-PDI meminta agar Pemerintah Daerah menyiapkan seluruh persyaratan teknis dan administrasi secara matang, termasuk perencanaan, dokumen pendukung, dan readines criteria, agar Kabupaten Temanggung mampu memperoleh manfaat maksimal dari skema tersebut. (Aiz;lstw;Ekp)

Sah! APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 Diketok

🔊 MEDIA CENTER

Bagikan:

 Instagram
  Facebook
  Twitter
  WhatsApp
  Telegram
  LinkedIn
  Pinterest

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Pencarian



Berita Terbaru



PPID Pemkab Temanggung Pastikan Dok →
 📅 Selasa, 01/09/2026 20:54 WIB 👁 8 ❤️ 0



Temanggung Kirim 191 Atlet ke POPDA →
 📅 Selasa, 01/09/2026 20:52 WIB 👁 3 ❤️ 0



Kawal Masa Depan Lingkungan Temangg →
 📅 Senin, 31/08/2026 20:52 WIB 👁 3 ❤️ 0

Berita Terpopuler



ASN dan Perangkat Desa Boleh Jadi PPK, PPS, dan KPPS
 📅 Kamis, 05/01/2023 07:57 WIB 👁 139037 ❤️ 11



Klanceng, Madu Dengan Banyak Manfaat dan Kasiat
 📅 Rabu, 19/02/2020 16:18 WIB 👁 107775 ❤️ 59



Empat Pilar Kebangsaan Tumbuhkan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
 📅 Selasa, 18/04/2023 18:55 WIB 👁 78617 ❤️ 5



Minimnya Akses Internet Jadi Kendala Pembelajaran Daring di Daerah Terpencil
 📅 Jumat, 14/08/2020 10:19 WIB 👁 63509 ❤️ 10

Kategori Berita

Pemerintahan (2051)

Kepala Daerah (555)

Kesehatan (339)

Pendidikan (272)

Sosial (301)

Ekonomi (322)

Ekonomi Kreatif (57)

Wisata & Budaya (272)

